

BAB I

PENDAHULUAN

1. Alasan Pemilihan Judul

Penulis memilih judul *“Respon Kuwait terhadap Moratorium Pekerja Domestik oleh Filipina Tahun 2018”* sebagai proposal penelitian karena beberapa alasan. Alasan pertama adalah penulis mengambil konsentrasi diplomasi. Sehingga dengan topik ini, penulis dapat mengkaji lebih dalam tentang isu *high politics*. Alasan kedua adalah isu baru dan berkaitan dengan hubungan negara Timur Tengah dan negara Asia Tenggara yang menarik untuk dikaji. Alasan ketiga adalah masih sedikit yang membahas kasus ini lebih mendalam, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus ini. Alasan terakhir adalah ketersediaan data yang mendukung penulis dalam proses penelitian *“Respon Kuwait terhadap Moratorium Pekerja Domestik oleh Filipina Tahun 2018”*.

2. Latar Belakang

Kuwait merupakan negara monarki konstitusional yang terletak di pesisir Teluk Persia, semenanjung Arab Timur Tengah. Negara Kuwait berbatasan langsung dengan Irak di utara dan Arab Saudi di selatan. Kuwait diinvasi oleh Irak pada tahun 1990 yang memicu terjadinya Perang Teluk pada tahun 1991. Invasi tersebut mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur pertambangan minyak di Kuwait. Pada tanggal 27 Februari 1991 Kuwait berhasil di bebaskan oleh koalisi PBB yaitu negara-negara Arab dan Eropa yang di pimpin oleh Amerika Serikat (Dickson, 2020).

Dawlat Al Kuwayt atau Kuwait memiliki jumlah populasi sebanyak 2.993. 706 jiwa pada tahun 2020. Kuwait di kenal sebagai negara yang makmur dengan pendapatan perkapitanya mencapai 30, 436. 744 USD pada tahun 2018 (CEIC, 2018). Negara ini memiliki jumlah penduduk asing yang lebih banyak dari penduduk aslinya.

Populasi Kuwait pada tahun 2014 mencapai 4,1 juta orang dengan 1,2 juta orang merupakan warga Kuwait, 1,1 juta warga Arab, 1,4 juta orang Asia dan sebanyak 76.698 adalah Afrika. Berdasarkan data dari *Kuwait Public Authority for Civil Information* per Desember 2018 penduduk Kuwait sebanyak 4,6 juta dengan presentase 30,36% adalah warga negara Kuwait dan 69,64% adalah warga negara asing (Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuwait, 2018).

Negara-negara Timur Tengah menjadi destinasi yang diminati oleh para pekerja asing. Pekerja asing mulai bermigrasi kenegara-negara Timur Tengah setelah minyak ditemukan sekitar tahun 1930-an. Arus pertamanya yaitu pekerja asing yang berasal dari sector teknisi, administrasi, dan profesional. Umumnya mereka hanya berasal dari negara Arab dan Barat saja, namun lambat laun menjadi di dominasi dari Asia Tenggara. Kondisi ini menciptakan ketergantungan negara-negara Timur Tengah terhadap pekerja asing. Sebagian besar sekarang bekerja di sector hospitality, perawat, migas dan konstruksi. Berdasarkan data BNP2TKI, Kuwait merupakan negara yang lebih banyak mengkonsumsi dan lebih banyak memperkerjakan orang daripada bekerja sendiri (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, 2016).

Hubungan Kuwait dan Filipina mulai memanas setelah ditemukannya jasad tenaga kerja Filipina Joanna Demafelis yang berusia 29 tahun didalam lemari es majikannya pada 6 Februari 2018. Jasad Joanna Demafelis ditemukan dalam kondisi membeku di apartemen majikannya setelah dilaporkan menghilang pada September 2016. Pejabat Filipina mengatakan terdapat bekas penganiayaan pada tubuh Joanna Demafelis. Pembunuhan ini dilakukan oleh mantan majikannya yaitu Nader Essam Assaf yang berasal dari Lebanon dan Istrinya Mona Hassoun yang merupakan warga negara Suriah. Keduanya masuk kedalam subjek

perburuan Internasional dan Interpol ikut terlibat dalam pencarian tersebut. Nader Essam Assaf yang merupakan warga Lebanon ditangkap di negara asalnya, sedangkan istrinya sempat menjadi buronan sebelum ditangkap di Suriah. Kasus pembunuhan Joanna menjadi awal terungkapnya kasus-kasus penyiksaan yang diterima oleh tenaga kerja wanita Filipina lainnya (BBC, 2018).

Filipina mengklaim bahwa tenaga kerjanya sering mendapatkan perlakuan kasar yang berujung pada bunuh diri. Namun, kasus terakhir yakni pembunuhan Joana Demafelis seorang warga Filipina membuat Duterte mengambil keputusan untuk melarang warga negaranya bekerja di Kuwait. Pada 12 Februari 2018 presiden Filipina Duterte mengambil keputusan untuk melarang warganya bekerja di Kuwait terutama wanita. Keputusan tersebut disebabkan karena tidak adanya solusi diplomatik yang diberikan Kuwait atas kasus kematian pekerja asal Filipina Joanna Demafelis. Keputusan ini mendapat kecaman dari Kuwait karena Filipina semakin meningkatkan larangan tersebut. Kebijakan larangan *Overseas Filipino Workers* (OFW) ke Kuwait menunjukkan bahwa pemerintah Duterte berusaha untuk menanggapi kasus pembunuhan dan pelecehan seksual terhadap pekerja Filipina secara serius (BBC, 2018).

Filipina mengirimkan surat kepada pemerintah Kuwait untuk segera melakukan langkah-langkah yang lebih kuat untuk melindungi para pekerja Filipina. Namun, kebijakan Duterte untuk melarang warga Filipina bekerja di Kuwait tidak sepenuhnya disetujui oleh warga Filipina yang bekerja di Kuwait. Larangan ini tidak berhasil mengatasi perlakuan buruk terhadap pekerja, namun sebaliknya membuka jalan bagi pekerja Filipina untuk menggunakan cara lain yang tidak resmi dan tidak aman untuk memasuki Kuwait. Tujuan dari larangan tersebut adalah untuk menunjukkan peran penting pekerja Filipina dengan cara

menempatkan Kuwait dalam posisi yang tidak menguntungkan (Jr, 2020).

Kebijakan moratorium terhadap tenaga kerja domestik oleh Filipina menyebabkan terjadinya defisit jumlah tenaga kerja terutama pada sektor pekerja rumah tangga. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kuwait mencari sumber tenaga kerja melalui negara lain. Langkah ini bertujuan untuk merespon masalah larangan penyebaran tenaga kerja Filipina di Kuwait yang menjadi beban bagi pengusaha Kuwait. Namun, kebijakan tersebut justru mengakibatkan penurunan terhadap kualitas tenaga kerja yang ada di Kuwait. Oleh karena itu, Kuwait mulai menegosiasikan permasalahan tersebut dengan Ethiopia sebagai alternative kebijakan yang lebih baik untuk pemenuhan tenaga kerja di Kuwait. Sebelumnya Ethiopia juga sempat melarang warga negaranya bekerja di Kuwait karena tidak setuju dengan sistem ketenagakerjaan yang ada di Kuwait (Jr, 2020).

Hubungan diplomatik antara Kuwait dan Filipina menjadi semakin buruk setelah duta besar Filipina Renato Villa di berikan *persona non grata* oleh Kuwait. Keputusan ini diberikan oleh Kuwait setelah tersebarnya video staf kedutaan besar Filipina membantu warga negaranya yang bekerja Filipina melarikan diri dari majikannya. Sebelumnya, Duterte memerintahkan kepada 10.000 pekerja Filipina yang telah melebihi batas akhir visa di Kuwait untuk kembali ke Filipina (Villamor, 2018). Duterte mengklaim akan menanggung semua biaya kepulangan dan menjamin hidup yang nyaman di Filipina.

Kuwait mengklaim tindakan yang dilakukan Filipina sudah melanggar kedaulatannya, sehingga Kuwait memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap tiga staf kedutaan yang ikut terlibat dalam pelanggaran tersebut dan mengusir duta besar Filipina Renato Villa dari Kuwait serta menarik diplomatnya dari Manila. Berdasarkan laporan dari kantor berita pemerintah

KUNA, duta besar Filipina Renato Villa di beri waktu satu minggu untuk meninggalkan Kuwait (KUNA, 2018). Menteri luar negeri Filipina Alan Peter Cayetano menyampaikan permintaan maaf atas kasus tersebut dan menjelaskan bahwa staf kedutaan hanya menanggapi keluhan yang dialami oleh warga negaranya. Kementerian luar negeri Filipina meminta Kuwait untuk menyampaikan alasan pengusiran dan penarikan duta besarnya dari Filipina, namun pemerintah Kuwait tidak menanggapi hal tersebut dan menuduh Filipina sudah melanggar kedaulatannya (Perdana, 2018).

Filipina melanggar Hak Asasi Manusia 260.000 tenaga kerjanya di Kuwait tidak terpenuhi. Sistem Kafalah¹ atau sistem ketenagakerjaan yang ada di Timur Tengah banyak dikecam oleh negara dan organisasi HAM. Sistem tersebut dianggap memudahkan terjadinya eksploitasi pekerja, karena banyak majikan yang menyita paspor dan memperlakukan para pekerja dengan buruk. Hal ini membuat pekerja tidak mendapat jaminan perlindungan yang cukup dari perilaku majikan yang menahan gaji, pelecehan, pemaksaan waktu kerja hingga peganiayaan fisik. Banyak dari pekerja yang ingin melarikan diri justru mendapat tuntutan hukum karena dianggap melarikan diri

¹ “*Kafalah*” berasal dari bahasa Arab yang berarti menjamin atau menjaga, sementara orang yang menjamin dan menjaga disebut “*Kafeel*”. Sistem Kafalah merupakan sistem yang menetapkan kewajiban pada pengurusan dan perlindungan terhadap “*Foreign Guests*”. Pada sistem ini, status imigrasi tenaga kerja migrant selama kontrak akan terikat oleh majikannya (*Kafeel*). Pekerja tidak dapat memasuki negara, bekerja ditempat lain, ataupun meninggalkan negara tanpa mendapatkan izin tertulis dari *Kafeel*.

dan tidak dapat berpindah tempat tanpa seizin majikannya (Teta, 2018).

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka penulis mengambil sebuah rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu: **Bagaimana respon Kuwait terhadap kebijakan moratorium pekerja domestik oleh Filipina tahun 2018?**

4. Kerangka Pemikiran

Sebagai pedoman penulis dalam melakukan penelitian dan untuk menjawab rumusan masalah, maka penulis menggunakan kerangka berfikir untuk menjelaskan bagaimana respon pemerintah Kuwait terhadap kebijakan Moratorium pekerja domestik oleh Filipina tahun 2018. Penulis menggunakan model Aktor Rasional untuk menganalisa bagaimana Kuwait merespon kebijakan Moratorium pekerja domestik oleh Filipina tahun 2018.

4.1. Model Aktor Rasional

Dasar dalam mengkaji kebijakan luar negeri suatu negara yaitu bagaimana dan mengapa aktor internasional bertindak dalam hubungan internasional? (McClelland, 1981) Kerangka pengambilan kebijakan bertujuan untuk menjelaskan apa yang harus dipertimbangkan dalam mengambil sebuah kebijakan dan sebab mengapa suatu negara bertindak dalam politik internasional. Teori pengambilan kebijakan juga menganalisa bagaimana perilaku pengambil kebijakan pemilih, legislator, pejabat eksekutif, politisi, pemimpin kelompok kepentingan, dan aktor lain di arena politik (James E. Dougherty, 1990). Snyder mengatakan aksi, reaksi dan interaksi merupakan komponen yang menghasilkan sebuah kebijakan luar negeri yang seharusnya diperhatikan (Richard C. Snyder, *The Decision Making Approach to the Study of International Politics*, 1969). Menurut Snyder, kebijakan luar negeri

merupakan kombinasi dari aktor, tujuan, cara dan situasi yang dirangkum sebagai berikut.

“The situation is defined by the actor (or actors) in terms of the way the actor (or actors) relates himself to other actors, to possible goals, to possible means, and in terms of the way means and ends are formed into strategies of action subject to relevant factors in the situation. These ways of relating himself to the situation (and thus of defining it) will depend on the nature of actor-or his orientation.” (Richard C. Snyder, 1969)

Graham T. Allison menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara merupakan hasil dari tindakan aktor rasional yaitu pemerintah yang bertujuan untuk mencapai kepentingannya. Dalam jurnalnya yang berjudul *The American Political Science Review (Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis)* Graham T. Allison mengatakan (Allison, 1969):

“the assumption of rational behavior not just of intelligent behaviour, but of behavior motivated by conscious calculation of advantages, calculation that in turns is based on an explicit and internally consistent value system”

Bagan 4.1. : Aktor Rasional dan Politik Luar Negeri



Dalam bukunya *Essence of Decision* Graham T. Allison mengajukan tiga model untuk menjelaskan proses pembuatan kebijakan luar negeri dalam perspektif “*Decision Making Process*”, yaitu: Model Aktor Rasional (MAR), Model Proses Organisasi (MPO), dan Model Politik Birokratik (MPB), sebagai berikut: (Allison, *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*, 1971)

1) Model Aktor Rasional (*Rational Actor*)

Model Aktor Rasional menekankan bahwa proses pengambilan keputusan melewati tahapan penentuan kebijakan yang dianggap sebagai opsi rasional didasarkan pada kalkulasi untung dan rugi.

2) Model Proses Organisasi (*the Organization Process*)

Model Proses Organisasi menekankan bahwa proses penentuan kebijakan melewati tahapan *Standard operating procedure*. Kebijakan yang dihasilkan dianggap sebagai hasil dari organisasi yang telah mempertimbangkan tujuan, sasaran dan skala prioritas.

3) Model Politik Birokratik (*Bureaucratic/Governmental Politics*)

Model Politik Birokratik menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan dirumuskan melalui negosiasi antar aktor, kelompok, dan pihak yang memiliki kepentingan. Kebijakan yang dihasilkan merupakan hasil dari negosiasi yang kompleks.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Model Aktor Rasional dengan negara merupakan aktor rasional yang selalu bertindak berdasarkan kepentingannya sendiri. Model Aktor Rasional merupakan sebuah proses pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara yang dibuat oleh Aktor Rasional dari negara tersebut. Proses pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh aktor yang paling dominan, yaitu pemimpin negara seperti Presiden dan Perdana Menteri. Model Aktor Rasional menghasilkan kebijakan luar negeri sebagai produk ideal yang dihasilkan dari kalkulasi untung dan rugi. Proses pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara didasarkan pada hal-hal yang bersifat rasional,

berdasarkan akal pikiran dan kepentingan nasional negara tersebut yaitu *feedback* yang didapat bagi negaranya.

Negara dianggap sebagai Aktor Individu Rasional yang memiliki kemampuan dalam memaksimalkan nilai serta tujuan berdasarkan situasi yang terjadi. Model Aktor Rasional menjelaskan bahwa negara dapat dengan benar mengidentifikasi tantangan kebijakan luar negeri dan membuat keputusan terbaik yang memungkinkan dalam hal keuntungan dan biaya, memperhitungkan tujuan dan nilai negara (Sorensen, 2013). Negara merupakan aktor yang berusaha untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan mereka yang didasarkan pada pilihan rasional dalam politik global. Sebagai Aktor Rasional, negara akan bertindak dan mempertimbangkan semua pilihan melalui kebijakan yang rasional. Mereka akan dihadapkan pada pilihan kebijakan yang masing-masingnya memiliki konsekuensi. Dalam proses tersebut negara akan memiliki kebijakan yang memiliki keuntungan paling tinggi guna memnuhi tujuannya (*goals and objectives*) (Allison, 1971).

Tabel 4.2. : Alternatif Untung Rugi Menurut Allison

Opsi	Keuntungan	Kerugian
Alternatif A	Ada	Ada
Alternatif B	Ada	Ada

Sumber: (Allison, 1971)

Aktor Rasional dianggap mampu dalam memperhitungkan hasil, nilai serta manfaat yang diharapkan dari setiap kebijakan. Aktor Rasional

menjelaskan tujuan mereka secara rinci, pilihan-pilihan yang tersedia dan konsekuensi-konsekuensi yang didapat dari tiap alternatif kebijakan (Bambang W. Nugroho, 2014). Tabel diatas menjelaskan bahwa pembuat keputusan akan menghitung keuntungan yang didapat dari setiap alternative kebijakan, membandingkan dan mengukur setiap alternatif, dan memilih alternatif kebijakan yang dapat memaksialkan keuntungan (*benefit*) dan meminimalkan kerugian (*cost*). Dalam pengambilan kebijakan, Aktor Rasional juga memperhitungkan keadaan lingkungan mereka seperti informasi di lingkungan mereka, aktor lain ataupun konsekuensi dari tindakan mereka.

Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan posisi Kuwait saat Filipina mengeluarkan Moratorium I yang menyebabkan krisis hubungan bilateral diantara keduanya tahun 2018. Hubungan Kuwait dan Filipina mulai memanas ketika salah satu pekerja asal Filipina di bunuh dan menyebabkan Filipina mengeluarkan kebijakan untuk melarang warganya bekerja di Kuwait. Posisi Kuwait saat itu dihadapkan pada pilihan merespon tuduhan Filipina atau tidak merespon tuduhan Filipina. Kuwait sebenarnya masih membutuhkan Filipina sebagai negara yang menyediakan tenaga kerja, mengingat kebutuhan untuk tenaga kerja di Kuwait masih tinggi terutama di sektor rumah tangga. Namun disisi lain Kuwait juga harus mempertahankan citranya di global, karena selama ini sudah banyak tuduhan yang diterima Kuwait terkait sistem tenaganya.

Kuwait bertindak sebagai aktor rasional untuk menentukan kebijakan terbaik yang akan diambil untuk mengatasi krisis dengan Filipina. Menurut penulis Kuwait memiliki dua alternatif kebijakan yang bisa diambil untuk menyikapi Moratorium pekerja domestik oleh Filipina tahun 2018, yaitu sebagai berikut:

1. Kuwait merespon kebijakan Moratorium pekerja domestik oleh Filipina meskipun masih ada munculnya tuntutan lain dari Filipina.
2. Kuwait tidak merespon kebijakan Moratorium pekerja domestik oleh Filipina dan siap menerima tuduhan Filipina yang dimungkinkan bisa terus meningkat dan membuat hubungan Kuwait dengan Filipina semakin memanas.

Dari masing-masing alternatif kebijakan yang dapat dipilih oleh Kuwait tentu memiliki kalkulasi untung dan rugi. Pada penelitian ini, penulis telah menganalisis kalkulasi untung dan rugi dari setiap kebijakan yang akan dijabarkan melalui tabel berikut:

Tabel 4.3. : Alternatif Untung Rugi Kuwait

Ops	Keuntungan	Kerugian
Merespon Kebijakan Moratorium Pekerja Domestik oleh Filipina	1) Kuwait dapat melindungi kedaulatan negaranya yang telah di langgar oleh Filipina. 2) Kuwait dapat menjalin hubungan baik lagi dengan negara lain dan mendapatk	1) Tenaga kerja yang didapat dari negara lain kualitasnya tidak sebagus Filipina. 2) Membuat hubungan Kuwait dan Filipina semakin memanas.

	<p>an alternatif tenaga kerja.</p> <p>3) Dapat menghemat anggaran terhadap tenagakerja dengan menggunakan pekerja dari Ethiopia</p>	
<p>Tidak Merespon Kebijakan Moratorium Pekerja Domestik oleh Filipina</p>	<p>1) Dapat mencegah terjadinya krisis hubungan diplomatik antara Kuwait dan Filipina</p> <p>2) Kualitas tenaga kerja tetap bagus dengan tetap menggunakan tenaga kerja dari Filipina.</p>	<p>1) Kuwait membiarkan kedaulatan negaranya dilanggar oleh Filipina.</p> <p>2) Menutup peluang bagi Kuwait untuk membuka kerjasama dengan negara lain terkait tenaga kerja.</p> <p>3) Tetap menggunakan pekerja Filipina</p>

		yang lebih mahal di bandingkan dengan pekerja dari negara lain.
--	--	---

Dari tabel kalkulasi untung rugi diatas dapat dilihat jika banyak keuntungan yang didapat Kuwait jika merespon kebijakan Filipina dan banyak kerugian yang didapat jika Kuwait tidak merespon kebijakan Filipina. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa dengan Kuwait merespon kebijakan Filipina, Kuwait dapat melindungi kedaulatan negaranya yang sudah dilanggar Filipina saat mereka membantu warga negaranya kabur dari rumah majikannya. Kebijakan tersebut dianggap Kuwait sudah mengancam kedaulatannya karena Filipina sudah melanggar hukum negaranya. Untuk merespon hal tersebut, Kuwait memberikan *Persona non grata* kepada duta besar Filipina dan menarik kedutaannya di Manila. Keuntungan selanjutnya yaitu Kuwait dapat membuka peluang kerjasama kembali dengan Ethiopia yang sempat rusak untuk membantu Kuwait memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya. Hal ini membuka kesempatan bagi Kuwait untuk memperbaiki hubungan dengan Ethiopia.

5. Hipotesa

Berdasarkan penjelasan pada kerangka teori di atas, maka hipotesis yang dapat disusun penulis sebagai jawaban sementara atas permasalahan pada penelitian mengenai mengapa Kuwait merespon kebijakan Moratorium tenaga kerja domestik oleh Filipina yaitu :

- 1) Mengatasi defisit tenaga kerja yang terjadi akibat dari Moratorium Filipina dengan mencari alternatif sumber tenaga kerja dari Ethiopia.
- 2) Melindungi kedaulatan Kuwait yang dilanggar oleh Filipina dengan memberikan *persona non grata*

kepada Duta Besar Filipina Renato Villa dan menarik kedutaannya di Manila.

6. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan karya tulis ini adalah :

1. Untuk menjawab rumusan masalah dengan menggunakan teori serta membuktikan hipotesa berdasarkan fakta dan data yang ada.
2. Untuk mengetahui bagaimana Kuwait merespon kebijakan moratorium terhadap pekerja domestik oleh Filipina tahun 2018.

7. Metode Penelitian

Penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*). Data-data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, surat kabar, internet dan media-media lainnya.

8. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penulisan karya tulis ini dimulai dari penemuan jenazah pekerja asal Filipina Joana Demafelis pada 6 Februari 2018 sampai dengan kebijakan Kuwait memberikan *persona non grata* kepada Duta Besar Filipina Renato Villa dan menarik kedutaannya di Manila pada 25 April 2018. Topik utama dalam penulisan ini meliputi bagaimana Kuwait merespon kebijakan moratorium pekerja domestik oleh Filipina yang dilakukan melalui kebijakan-kebijakan dalam krisis ketenagakerjaan dengan Filipina.

9. Sistematika penulisan

Penulis mengelompokkan penelitian ini menjadi beberapa bab yang bertujuan untuk mempermudah penyusunan dalam pembahasan terhadap pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Bab I, memuat pendahuluan penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II, memuat elaborasi dari latar belakang masalah yang menjelaskan profil negara Kuwait dan profil negara Filipina, menjelaskan dinamika hubungan dan kerjasama Kuwait dengan Filipina, serta menjelaskan sistem ketenagakerjaan Kuwait.

Bab III, memuat analisa penulis terkait respon Kuwait terhadap kebijakan Moratorium pekerja domestik oleh Filipina yaitu: kebijakan Kuwait untuk membuka kerjasama kembali dengan Ethiopia dan keputusan Kuwait memberikan *persona non grata* kepada Duta Besar Filipina Renato Villa dan menarik kedutaannya di Manila.

Bab IV, memuat kesimpulan singkat penelitian dari bab-bab sebelumnya dan rekomendasi.